

**ANALISIS FRAMING PADA PEMBERITAAN LARANGAN PEMAKAIAN
JILBAB BAGI POLWAN DALAM SURAT KABAR HARIAN REPUBLIKA
EDISI 4-15 JUNI DAN KORAN KOMPAS EDISI 14 JUNI-9 JULI 2013**



SKRIPSI

Diajukan Pada Fakultas Dakwah dan Komunikasi
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
Untuk memenuhi sebagai persyaratan
Guna Memperoleh Gelar Sarjana

Disusun oleh :
SARTIKA DEWI
NIM: 08210068

Dosen Pembimbing :
Mohammad Zamroni, S.Sos.I., M. Si
NIP: 197807172009011012

**JURUSAN KOMUNIKASI DAN PENYIARAN ISLAM
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2014



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI

Jl. Marsda Adisucipto, Telp. 0274-515856, Yogyakarta 55281, E-mail: fd@uin-suka.ac.id

PENGESAHAN SKRIPSI/TUGAS AKHIR

Nomor: UIN.02/DD/PP.00.9/ 284 /2014

Skripsi/Tugas Akhir dengan judul:

**ANALISIS FRAMING PADA PEMBERITAAN LARANGAN PEMAKAIAN JILBAB
BAGI POLWAN DALAM SURAT KABAR HARIAN REPUBLIKA EDISI 4-15 JUNI
DAN KORAN KOMPAS EDISI 14 JUNI -9 JULI 2013**

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : SARTIKA DEWI
NIM/Jurusan : 08210068/KPI
Telah dimunaqasyahkan pada : Senin, 3 Februari 2014
Nilai Munaqasyah : 86,6 (A/B)

dan dinyatakan diterima oleh Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

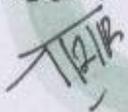
TIM MUNAQASYAH

Ketua Sidang/Penguji I,

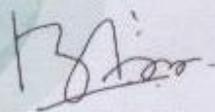

Mohammad Zamroni, S.Sos.I., M.Si.

NIP 19780717 200901 1 012

Penguji II,


Drs. Abdul Rozak, M.Pd.
NIP 19671006 199403 1 003

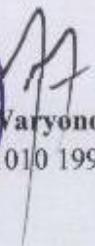
Penguji III,


Ristiana Kadarsih, S.Sos., M.A.
NIP 19770528 200312 2 002

Yogyakarta, 13 Pebruari 2014

Dekan,




Dr. H. Waryono, M.Ag.
NIP 19701010 199903 1 002



SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Kepada:

Yth. Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Di Yogyakarta

Assalamu 'alaikum wr. wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Saudara:

Nama : Sartika Dewi

NIM : 08210068

Judul Skripsi : **Analisis Framing Pada Pemberitaan Larangan Pemakaian Jilbab Bagi Polwan Dalam Surat Kabar Harian Republika Edisi 4-15 dan Koran Kompas Edisi 14 Juni-9 Juli 2013**

Sudah dapat diajukan kembali kepada Fakultas Dakwah Dan Komunikasi Jurusan/Program Studi Komunikasi Dan Penyiaran Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam bidang Komunikasi Islam.

Dengan ini kami berharap agar skripsi tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Yogyakarta, 20 Januari 2014

Mengetahui :

Ketua Jurusan KPI

Pembimbing

Khoiro Ummatun, S. Ag, M. Si
NIP. 19710328 199703 2 001

Mohammad Zamroni, S.Sos.I., M. Si
NIP. 19590408 198503 1 005

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

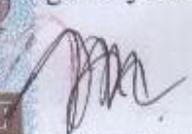
Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Sartika Dewi
NIM : 08210068
Jurusan : Komunikasi Dan Penyiaran Islam
Fakultas : Dakwah Dan Komunikasi

Menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa skripsi saya yang berjudul: **“Analisis Framing Pada Pemberitaan Larangan Pemakaian Jilbab Bagi Polwan Dalam Surat Kabar Harian Republika Edisi 4-15 dan Koran Kompas Edisi 14 Juni-9 Juli 2013”** adalah hasil karya pribadi dan sepanjang pengetahuan penyusun tidak berisi materi yang dipublikasikan atau ditulis orang lain, kecuali bagian-bagian tertentu yang penyusun ambil sebagai acuan.

Apabila terbukti pernyataan ini tidak benar, maka sepenuhnya menjadi penanggung jawab penyusun

Yogyakarta, 15 Januari 2014

Yang menyatakan,

Sartika Dewi
08210068

METERAI
TEMPEL
DAFTAR PENGALAMAN
9E899ACF136626585
6000
DJI

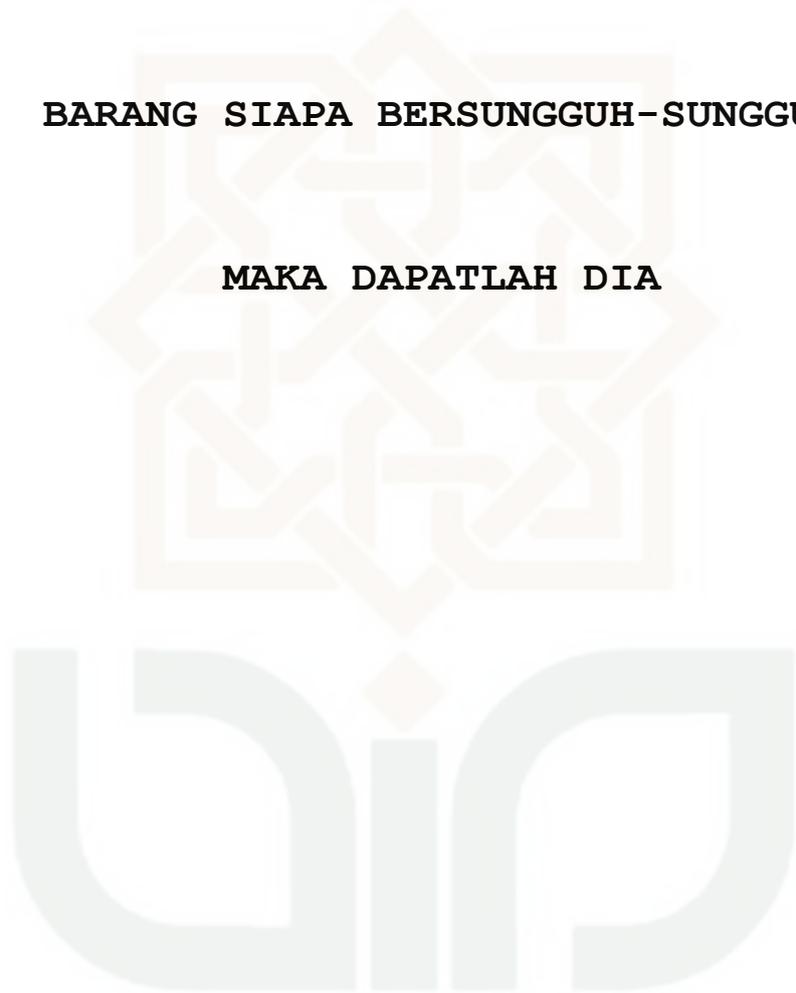
HALAMAN PERSEMBAHAN

- ❖ **Puji Sukur kepada ALLAH SWT yang telah meberikan kekuatan**
- ❖ **Almater Jurusan Komunikasi dan Penyiaran Islam**
- ❖ **Nenek, kakek, Ayah dan Ibu tercinta, yang tiada henti memberikan doa dan kasih sayangnya**
- ❖ **Kakak-kakaku dan abang (Bari Febriansyah) yang terus memberikan semangat dan senyumnya**
- ❖ **Saudara-saudaraku yang tak pernah lelah memberikan semangat dan motivasinya**
- ❖ **Sahabat-sahabatku yang tak pernah lelah membangunkan aqu ketika aqu sudah terjatuh dan tak bisa bangkit lagi**

Motto

BARANG SIAPA BERSUNGGUH-SUNGGUH

MAKA DAPATLAH DIA



KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

أَلْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي عَلَّمَ بِالْقَلَمِ عِلْمَ الْإِنْسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ

ثُمَّ صَلَاةً وَسَلَامًا عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

Puji syukur kehadiran Allah SWT atas luapan rahmat, taufiq, kemudahan dan kelancaran dalam proses pengerjaan karya sederhana ini hingga selesai. Sholawat serta salam senantiasa tercurah kepada Kanjeng Nabi Muhammad SAW, keluarga, sahabat dan para pengikutnya.

Skripsi dengan judul **“Analisis Framing Pada Pemberitaan Larangan Pemakaian Jilbab Bagi Polwan Dalam Surat Kabar Harian Republika Edisi 4-15 dan Koran Kompas Edisi 14 Juni-9 Juli 2013”** ini disusun guna memenuhi sebagian persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Komunikasi Islam (S.Kom.I) di Jurusan Komunikasi dan Penyiaran Islam Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Negeri Islam (UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta. Semoga karya ini menjadi salah satu bentuk pembelajaran.

Dalam penyusunan risalah ini, penulis menyadari banyak pihak yang telah memberi dukungan, baik moral maupun materiil. Untuk itu, penulis mengucapkan terima kasih dan penghargaan setulusnya kepada:

1. Prof. Dr. Musa Asy'ari selaku rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Dr. H. Waryono, M.Ag, selaku Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Khoiru ummatin, S.Ag, M.Si selaku Ketua Jurusan Komunikasi Penyiaran Islam Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan Kalijaga

4. Mohammad Zamroni S.Sos.I.,M.Si selaku pembimbing skripsi yang dengan sabar membimbing dan memberi arahan dalam penyusunan karya ini.
5. Ristiana Kadarsih, S. Sos, MA, selaku penasehat akademik.
6. Semua staf pengajar di Jurusan Komunikasi dan Penyiaran Islam Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang tidak perlu disebutkan satu persatu. Semoga ilmu dan keikhlasan yang telah diberikan menjadi amal *jariyah* yang tak terputus-putus pahalanya.
7. Nenek, Ayah dan Ibu tercinta, hanya Allah-lah dzat yang sebaik-baiknya pemberi balasan. Juga kepada kakak-kakakku dan sang pujaan hati (Abang Bari Febriansyah) yang tak henti selalu memberikan dorongan dan semangat
8. Teman seperjuangan KPI 2008 (Mba Nia, Sipa, Luki, Qury, Jauhar, Rahma, Icha, Eka, Dedi, Semi, Anwar, wawan, Rama, dan semua teman-teman yang tidak saya sebutkan satu persatu, terima kasih atas canda dan tawa serta kebersamaan yang menghadirkan banyak manfaat. Semoga dapat bersama kembali, walau tidak dalam satu jalan.
9. Sahabat-sahabatku tercinta keluarga besar “ASRAMA PUTRI BANGKA BELTUNG” (Dek Ana, Dek Diah, Dek Poe, Dek Cici, Dek Amoy, Dek Zia, Dek Mega, Dek Mega Uuk, Yuk Helen, Dek Iis Nyak, Dek Raras, Dek Vella, Dek Ayi Dek Sulas, Dek Uci, Dek Fifri, Dek Yis & Dek Cocom) yang tiada hentinya memberikan motivasi dan semangat. terima kasih, karena kalian telah memberikan warna dalam hidupku

10. Dan semua pihak yang telah membantu dan mendukung dalam pembuatan skripsi ini, yang tidak mungkin penulis sebut satu-persatu.

Penulis sadar bahwa skripsi ini masih jauh dari kata “layak”. Keterbatasan waktu, pikiran, tenaga, biaya dan sebagainya membuat karya ini masih perlu “jahitan khusus” di sana-sini. Karena itu, kritik dan saran yang konstruktif selalu penulis harapkan. Mudah-mudahan skripsi ini dapat berguna bagi siapapun yang membacanya dan menjadi inspirasi bagi diskusi dan penelitian, khususnya dalam bidang kajian berikutnya.

Yogyakarta, 15 Januari 2014

Sartika Dewi
08210068

ABSTRAKSI

Isu terkait larangan penggunaan jilbab bagi polwan muncul berawal dari keluhan para Polwan yang notabene adalah seorang muslimah untuk taat terhadap aturan agamanya. Hal ini tentu wajar dan memang diatur oleh UUD 1945 sebagai bagian dari Hak Asasi Manusia (HAM). Namun demikian, meskipun hak beragama sudah diatur dalam UUD tetap saja tidak bisa diwujudkan dikarenakan tidak terkandung dalam peraturan Kepolisian Indonesia. Karena itu, kondisi yang terkesan kaku ini pun mendapat respon dari banyak pihak. Beberapa kalangan menganggap bahwa larangan memakai jilbab bagi Polwan merupakan hal yang tidak logis. Salah satunya datang dari Ketua Komnas HAM Siti Noor Laila yang mengatakan bahwa “pelarangan penggunaan jilbab bagi polisi wanita (polwan) muslim bertentangan dengan Hak Asasi Manusia (HAM).”

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana media (Kompas dan Republika) mengkonstruksi pemberitaan terkait larangan penggunaan jilbab bagi polwan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif interpretatif dengan menggunakan pendekatan analisis framing model Gamson dan Modeglioni. Model ini didasarkan pada pendekatan konstruksionis yang melihat representasi media seperti berita dan artikel terdiri atas *interpretative package* yang mengandung konstruksi makna tertentu. Di dalam *package* ini terdapat dua struktur yaitu *Core Frame* dan *Condensing Symbols*. *Core frame* (gagasan sentral) pada dasarnya berisi elemen-elemen inti untuk memberikan pengertian yang relevan terhadap peristiwa dan mengarahkan makna isu yang dibangun *condensing symbol*. *Condensing symbol* (simbol yang dimanfaatkan) adalah hasil pencerminan terhadap interaksi perangkat simbolik (*framing device* dan *reasoning devices*). Struktur *framing devices* mencakup *metaphors*, *exemplars*, *catchphrases*, *depiction* dan *visual images*. Sedangkan struktur *reasoning devices* menekankan aspek pembenaran terhadap cara melihat isu yakni dengan *roots* (analisis kausal) dan *appeal to principle* (klaim moral). Dengan menggunakan metode ini diharapkan adanya retorika-retorika yang menyiratkan keberpihakan dan kecenderungan tertentu dapat terbuka. Peneliti menginterpretasikan delapan berita terkait larangan penggunaan jilbab bagi polwan, dari hasil penelitian, peneliti menemukan dalam berita berjudul ”PKS: Harusnya Ada Aturan Pemakaian Jilbab Untuk Polwan” jilbab tergambar sebagai sebuah pakaian yang justru akan membuat perempuan lebih terhormat dalam melaksanakan segala aktivitasnya. Terlihat dari pernyataan Hidayat Nur Wahid, “penggunaan jilbab tidak akan menyebabkan kinerja polwan turun. Bahkan mungkin polwan bisa bekerja dengan lebih mudah jika memakai jilbab, karena lebih dihargai ketika menjalankan tugasnya di tengah masyarakat Muslim. Hidayat meminta, agar anggota Komisi III DPR mengkritisi aturan seragam polwan ini dengan serius. ”Seharusnya aturan seragam itu menghormati kekhasan yang dimiliki oleh penganut agama tertentu”.

Keys Note: *Analisis Framing, Jilbab, Polwan, Republika, Kompas*

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI.....	ii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN.....	ii
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	iii
HALAMAN MOTTO.....	iv
KATA PENGANTAR.....	vi
ABSTRAKSI.....	ix
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR TABEL.....	xii
DAFTAR GAMBAR.....	xiii
BAB I : PENDAHULUAN.....	1
A. Penegasan Judul.....	1
B. Latar Belakang.....	4
C. Rumusan Masalah.....	7
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	7
E. Kerangka Teori.....	8
F. Kerangka Pikir.....	19
G. Hasil Penelitian Terdahulu yang Relevan.....	21
H. Metode Penelitian.....	24
I. Sistematika Pembahasan.....	30

BAB II	: GAMBARAN UMUM TENTANG BERITA LARANGAN PENGUNAAN BAGI POLWAN, SURAT KABAR HARIAN REPUBLIKA DAN KOMPAS.....	31
	A. Gambaran tentang Berita Larangan Penggunaan Jilbab Bagi Polwan	
	B. Profil Harian Umum Surat Kabar Harian Republika.....	44
	C. Profil Harian Umum Surat Kabar Harian Kompas.....	53
BAB III	: TEMUAN DAN ANALISIS DATA.....	66
	A. Analisis Berita SKH Republika.....	76
	B. Analisis Berita SKH Kompas.....	82
BAB IV	: PENUTUP.....	101
	A. Kesimpulan.....	101
	B. Saran.....	103
	DAFTAR PUSTAKA.....	105
	LAMPIRAN-LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel 1:	Kerangka Pikir Penelitian.....	20
Tabel 2:	Kerangka Framing Gamson dan Modegliani.....	28
Tabel 3:	Analisis Berita DPR Minta Kapolri Segera Respons Permintaan Berjilbab Polwan.....	77
Tabel 4:	Analisis Berita Jilbab bagi Polwan Harus Dikaji.....	79
Tabel 5:	Analisis Berita HTI Minta Polri Ubah Aturan Seragam Polwan Tak Boleh Berjilbab.....	83
Tabel 6:	Analisis Berita Melarang Polwan Berjilbab Sama Saja Melanggar HAM.....	86
Tabel 7:	Analisis Berita PPP Izinkan Polwan Berjilbab.....	88
Tabel 8:	Analisis Berita Sesuai Aturan, Polwan tidak Bisa Pakai Jilbab.....	91
Tabel 9:	Analisis Berita Polri Evaluasi Penggunaan Jilbab Untuk Polwan.....	93
Tabel 10:	Analisis Berita Polri Kaji Penggunaan Jilbab bagi Polwan.....	98

DAFTAR GAMBAR

- Gambar 1: Polwan sedang berbaris tegap, tapi seorang Polwan menoleh.....67
- Gambar 2: Seorang anggota Polwan menyematkan pin pada seorang penumpang angkot ketika memperingati Hari Anti Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak di Monumen Perjuangan Polri Surabaya, Jatim, Senin (26/11).....68
- Gambar 3: Foto Juru Bicara Hizbut Tahrir Indonesia (HTI), Muhammad Ismail Yusanto.....70
- Gambar 4: Gambar Polwan yang sedang berbaris dengan pandangan lurus ke depan, tapi seorang Polwan menoleh.....71
- Gambar 5: Gambar lambang Partai Persatuan Pembangunan (PPP).....72
- Gambar 6: Gambar lambang Partai Persatuan Pembangunan (PPP).....73
- Gambar 7: Foto Kepala Biro Penerangan Masyarakat Polri Brigadir Jenderal (Pol) Boy Rafli Amar.....74
- Gambar 8: Foto Polwan Polda Aceh mengenakan jilbab pada peringatan HUT ke-67 Bhayangkara di halaman Mapolda Aceh, Banda Aceh, Senin (1/7/2013).....75

BAB I

PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Untuk memperjelas dan menghindari kesalahpahaman dalam memahami proposal yang berjudul “Analisis Framing Pada Pemberitaan Larangan Pemakaian Jilbab Bagi Polwan Dalam Surat Kabar Harian Republika Edisi 4-15 Juni dan Koran Kompas Edisi 14 Juni-9 Juli 2013”, maka dipandang perlu adanya penegasan terhadap istilah-istilah yang ada dalam judul tersebut yaitu:

1. Analisis Framing

Analisis framing atau juga yang dikenal dengan sebutan analisis bingkai adalah suatu studi yang mendalam untuk mengkaji bagaimana isi teks media yang ditampilkan kepada khalayak. Framing itu akhirnya menentukan bagaimana realitas itu hadir di hadapan pembaca. Apa yang kita ketahui tentang realitas pada dasarnya tergantung pada bagaimana kita melakukan *frame* atas peristiwa yang memberikan pemahaman dan pemaknaan tertentu atas suatu peristiwa.

Secara sederhana analisis framing mencoba untuk membangun sebuah komunikasi bahasa, visual, pelaku, dan menyampaikannya kepada khalayak atau menginterpretasikan dan mengklasifikasikan informasi baru. Melalui analisis framing atau bingkai kita mengetahui

bagaimanakah pesan diartikan sehingga dapat diinterpretasikan secara efisien dalam hubungannya dengan ide penulis.¹

Jadi, Analisis Framing dapat didefinisikan sebagai sebuah studi untuk memahami strategi media dalam membingkai suatu berita, baik dengan cara melakukan penonjolan, penempatan dalam halaman depan (seperti dijadikan *headline*) ataupun pencitraan.

2. Pemberitaan/Berita

Secara etimologi pemberitaan berarti proses atau cara perbuatan memberitakan (melaporkan, memaklumkan). Sedangkan dalam bukunya Djuroto yang berjudul “Teknik Mencari dan Menulis Berita” disebutkan bahwa ‘Berita’ berasal dari bahasa Sanskerta “*Vrit*” yang dalam bahasa Inggris disebut “*Write*”. Arti sebenarnya adalah “ada” atau “terjadi”, tapi ada juga yang menyebut dengan “*Vritta*” artinya “kejadian” atau “yang telah terjadi”. “*Vritta*” dalam bahasa Indonesia kemudian menjadi “berita” atau “warta”. Jadi menurut artinya berita dapat dikaitkan dengan kejadian atau peristiwa yang terjadi.²

Sedangkan menurut Assegaf, berita adalah laporan tentang fakta termasa, yang dipilih oleh staf redaksi suatu harian untuk disiarkan,

¹ Eriyanto, *Analisis Framing: Konstruksi, Ideologi dan Politik Media* (Yogyakarta: LKis, 2001), hlm. 127.

² Syaikhuna Ahmad, *Analisis Framing Terhadap Pemberitaan Insiden Monas di Majalah Tempo Edisi 9-15 Juni 2008 dan Majalah Sabili Edisi No. 25 Th. XV 26 Juni 2008*, Skripsi (Fakultas Dakwah Institut Agama Islam Negeri Walisongo Semarang, 2010), hlm. 40.

yang menarik perhatian pembaca, atau akibatnya, entah pula karena ia mencakup segi *human interest* seperti humor, emosi dan ketegangan.³

3. Republika

Surat kabar ini lahir sebagai perwujudan program ICMI, yang pada saat itu di ketuai oleh BJ. Habibie yang menjabat sebagai Menteri Riset dan Teknologi. Dengan ambisi komersial, perspektif politik, koneksi yang baik, Republika muncul menghadapi tantangan yang diidentifikasi pada seminar ICMI.

Sesuai UU (Undang-Undang) Pokok Pers, penerbitan pers harus berbadan usaha. Untuk itulah Yayasan Abdi Bangsa mendirikan PT. Abdi Bangsa pada 28 November 1992. Satu bulan kemudian pada 19 Desember 1992, dengan dukungan ICMI surat kabar Republika memperoleh Surat Ijin Untuk Penerbitan Pers (SIUPP) yang pada saat itu media lain sangat sulit mendapatkannya. Habibie sebagai ketua ICMI sekaligus Menristek mengubah nama "Republik" menjadi "Republika". Dan pada 4 Januari 1993, Republika resmi berdiri. Perusahaan surat kabar ini mewakili konsep baru yang tegas dalam proses produksi dan pemasaran surat kabar.

4. Koran Kompas

Surat Kabar Harian Kompas merupakan surat kabar harian nasional yang didirikan oleh P.K. Ojong. Dia sempat mengecap kehidupan pers di masa revolusi kemerdekaan, demokrasi terpimpin,

³ Djafar Assegaf, *Jurnalistik Masa Kini: Pengantar ke Praktek Kewartawanan*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1985), hlm. 24.

juga awal orde baru. Ojong dan Oetama adalah dwitunggal di “intisari” dan kemudian di “Kompas” yang mereka dirikan pada tahun 1965. Kedua pendiri Kompas ini kebetulan penganut katolik dan sama-sama pengurus Ikatan Sarjana Katolik Indonesia. Ojong dan Oetama menolak komunisme yang sangat kental pada masa itu, atas dasar inilah keduanya bersiasat menamakan yayasan penerbitan mereka dengan Yayasan Bentara Rakyat. Namun ketika nama itu diajukan sebagai nama koran, presiden Soekarno merekomendasikan agar menamainya “Kompas”.

Dengan demikian, yang dimaksud dari judul di atas adalah bagaimana kedua surat kabar (Republika dan Kompas) melakukan pembingkaiian terhadap pemberitaan larangan penggunaan jilbab bagi Polwan.

B. Latar Belakang Masalah

Indonesia yang penduduknya bersifat plural tentu harus didukung oleh peraturan yang mampu menjangkau semua kalangan. Jamak yang berarti banyak atau beraneka ragam merupakan cerminan kondisi suatu masyarakat yang kaya akan budaya, agama, suku dan tradisi. Apapun golongan ras maupun agamanya harus diberi perlakuan yang sama sebagai warga negara.

Salah satu isu terbaru yang sedang berkembang di negeri ini adalah terkait pemakaian jilbab bagi Polwan (Polisi Wanita) beragama Islam. Isu

tersebut muncul berawal dari keluhan para Polwan yang notabene adalah seorang muslimah untuk taat terhadap aturan agamanya. Hal ini tentu wajar dan memang diatur oleh UUD 1945 sebagai bagian dari Hak Asasi Manusia (HAM).

Namun demikian, meskipun hak beragama (dalam konteks pemakaian jilbab) sudah diatur dalam UUD tetap saja tidak bisa diwujudkan dikarenakan tidak terkandung dalam peraturan Kepolisian Indonesia. Karena itu, kondisi yang terkesan kaku ini pun mendapat respon dari banyak pihak. Beberapa kalangan menganggap bahwa larangan memakai jilbab bagi Polwan merupakan hal yang tidak logis. Salah satunya datang dari Ketua Komnas HAM Siti Noor Laila yang mengatakan bahwa “pelarangan penggunaan jilbab bagi polisi wanita (polwan) muslim bertentangan dengan Hak Asasi Manusia (HAM).” Sedangkan menurut islam sendiri, seorang wanita diwajibkan memakai jilbab (setidak-tidaknya) ketika sudah baligh.

Dalam artian, jilbab merupakan bagian dari syariat Islam yang hukumnya wajib diikuti oleh pemeluknya. Sedangkan hak berkeyakinan seperti ini sudah diatur dan dilindungi oleh UUD 1945. Dengan demikian bilamana para Polwan muslimah menginginkan menggunakan kerudung atau jilbab ketika mereka bertugas seharusnya tidak perlu dijadikan persoalan apalagi dihalang-halangi. Ditambah lagi banyak dari para petinggi Polri yang beragama Islam di mana semestinya bersikap lebih realistis serta keluar dari kungkungan sistem yang cenderung kaku.

Apalagi jika kita membaca kembali UU Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia pada Pasal 19 sebenarnya telah ditegaskan bahwa dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia senantiasa bertindak berdasarkan norma hukum dan mengindahkan norma agama, kesopanan, kesusilaan, serta menjunjung tinggi hak asasi manusia. Soal pemakaian jilbab pada dasarnya tidak lagi perlu dipersoalkan bilamana mencermati kalimat “mengindahkan norma agama”.

Sedangkan menurut Satjipto Raharjo polisi merupakan alat negara yang bertugas memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, memberikan pengayoman, dan memberikan perlindungan kepada masyarakat⁴.

Oleh karenanya, persoalan ini menarik untuk dikaji lebih lanjut terutama untuk mengetahui peran media dalam mengkonstruksi pemberitaan terkait. Media massa sebagaimana kita ketahui sangat berperan penting dalam membangun sebuah wacana serta menjadikan sebuah isu sebagai opini publik. Upaya Polwan untuk mensukseskan keinginannya dianggap tidak akan mudah sebab harus merubah UU atau membuat peraturan baru. Akan tetapi, keinginan tersebut akan mudah dicapai jika media ikut berdiri di garda terdepan, seperti dilakukan oleh Republika di mana sangat santer memberitakan persoalan ini sejak awal hingga pertengahan bulan Juni 2013.

⁴ Satjipto Raharjo, *Hukum Progresif, Sebuah Sintesa Hukum Indonesia*, (Yogyakarta: Genta Publishing, 2009), hlm.111

Pengambilan Republika sebagai subjek penelitian dikarenakan media yang satu ini berideologi Islam. Sehingga isu-isu yang diangkat pun cenderung berkaitan dengan dunia Islam, termasuk persoalan kebebasan yang membelenggu Polwan. Bagaimana Republika membingkai persoalan tersebut dalam pemberitaannya adalah poin inti yang ingin dicapai dalam penelitian ini. Sedangkan Kompas merupakan koran nasionalis di mana cenderung menurunkan berita-berita yang berorientasi pada kepentingan orang banyak-mengambil jalan tengah.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas maka di sini dibuat rumusan masalah sebagai berikut:

Bagaimana framing pemberitaan Republika dan Kompas tentang larangan pemakaian Jilbab bagi Polwan edisi 4-15 Juni dan Koran Kompas Edisi 14 Juni-9 Juli 2013?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pemingkaiian berita yang dilakukan oleh Republika dan Kompas terkait larangan pemakaian Jilbab bagi Polwan (Polisi Wanita).

Sedangkan manfaat dari penelitian ini adalah:

1. Manfaat secara teoritis diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan penajaman kajian pada bidang komunikasi massa dan analisis media (terutama Analisis Framing).
2. Manfaat praktis yang diharapkan hasil penelitian ini adalah mengetahui seberapa besar peran media mampu membantu Polwan muslim mensukseskan tuntutannya untuk menggunakan jilbab.

E. Kerangka Teori

Setiap penelitian memerlukan kejelasan titik tolak atau landasan berpikir dalam memecahkan atau menyoroiti masalahnya. Untuk itu, perlu disusun kerangka teori yang memuat pokok-pokok pikiran yang menggambarkan dari sudut mana masalah penelitian akan disoroiti.⁵

1. Pengertian Media Massa

Wahyudi memberikan batasan, yakni media massa merupakan sarana untuk "menjual" informasi atau berita kepada konsumen yang dalam hal ini dapat berupa pembaca, pendengar, maupun pemirsa, yang mana mereka lazim disebut sebagai *audience*.⁶ Sedangkan Assegaf mengartikan media massa sebagai

⁵ H. Hadari Nawawi, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1995), hlm. 39.

⁶ Wahyudi JB., *Komunikasi Jurnalistik*, (Bandung: Alumni, 1991), hlm. 55.

sarana penghubung dengan masyarakat seperti surat kabar, majalah, buku, radio dan televisi.⁷

a. Karakteristik Media Massa

Untuk suksesnya komunikasi massa seseorang perlu mengetahui sedikit banyak ciri komunikasi itu, yang meliputi sifat-sifat unsur yang mencakupnya. Uchjana memberikan lima karakteristik, antara lain adalah:

1. Sifat Komunikasi

Komunikasi ditujukan kepada khalayak yang jumlahnya relatif besar dan heterogen. Ciri khas dari komunikasi melalui media massa ini ialah pertama bahwa jumlah yang besar itu hanya dalam periode waktu yang singkat saja. Kedua, komunikasi massa sifatnya heterogen. Selain itu komunikator tidak tahu apa pesan yang disampaikannya menarik perhatian atau tidak.

2. Sifat Media Massa

Sifat media massa adalah serempak cepat. Yang dimaksudkan dengan keserempakan kontrak antara komunikator dan komunikasi yang demikian besar jumlahnya. Selain itu sifat media massa adalah cepat.

⁷ Djaffar Assegaf, *Jurnalistik Masa Kini*, hlm. 129.

Artinya memungkinkan pesan yang disampaikan kepada begitu banyak orang dalam waktu yang cepat.

3. Sifat Pesan

Sifat pesan media massa lebih umum. Media massa adalah sarana menyampaikan pesan kepada khalayak, bukan untuk sekelompok orang tertentu. Karena pesan komunikasi massa bersifat umum, maka lingkungannya menjadi universal, mengakui segala hal dan dari berbagai tempat. Sifat lain media massa adalah sejenak (*transient*), hanya sajian seketika.

4. Sifat Komunikator

Karena media massa adalah lembaga atau organisasi, maka komunikator dalam media massa, seperti wartawan, sutradara, penyiar radio, TV adalah komunikator terlembagakan. Media massa merupakan organisasi yang kompleks. Pesan-pesan yang sampai kepada khalayak adalah hasil kerja kolektif. Oleh karena itu, berhasil tidaknya komunikasi massa ditentukan berbagai faktor yang terdapat dalam organisasi media massa. Berita yang disusun oleh seorang wartawan tidak akan sampai kepada pembaca kalau tidak dikerjakan oleh redaktur, lay out, juru

cetak dan karyawan lain dalam organisasi surat kabar tersebut.

5. Sifat Efek

Sifat komunikasi melalui media massa yang timbul pada komunikasi bergantung pada tujuan komunikasi yang dilakukan oleh komunikator. Apakah tujuannya agar tahu saja, atau agar komunikasi berubah sikap dan pandangannya, atau komunikasi berubah tingkah lakunya.⁸

2. Media dan Pemberitaan Dilihat Dari Paradigma Konstruksionis

Pendekatan Konstruksionis mempunyai penilaian sendiri bagaimana media, wartawan dan berita dilihat.⁹

a. Fakta / Peristiwa adalah hasil konstruksi

Bagi kaum Konstruksionis realitas ini subjektif. Realitas itu hadir karena dikonstruksi oleh konsep subjektif wartawan. Realitas tercipta lewat konstruksi, sudut pandang tertentu dari wartawan. Realitas bisa berbeda-beda tergantung pada bagaimana konsep realitas itu dipahami oleh wartawan yang mempunyai pandangan berbeda.

b. Media adalah agen konstruksi

Pandangan konstruksionis mempunyai posisi yang berbeda dibandingkan dengan positivis dalam menilai

⁸ Onong Udjana Effendi, *Ilmu Komunikasi*, (Bandung: Rosda karya, 1990), hlm. 35.

⁹ Eriyanto, *Analisis Framing: Konstruksi*, hlm. 19.

media. Dalam pandangan kaum positivis, media dilihat sebagai saluran, yakni bagaimana pesan disebarkan dari komunikator kepada khalayak. Sedangkan menurut pandangan konstruksionis media bukanlah sekedar saluran yang bebas, media juga subjek yang mengkonstruksi realitas, lengkap dengan pandangan, bias dan keberpihakannya. Disini berarti media dipandang sebagai agen konstruksi social yang mendefinisikan realitas, jadi berita yang ada bukan hanya menggambarkan realitas, bukan hanya menunjukkan pendapat nara sumber berita, tetapi juga konstruksi dari media itu sendiri. Media adalah agen yang secara aktif menafsirkan realitas untuk disajikan kepada khalayak.

c. Berita bukanlah refleksi dari realitas, berita hanya konstruksi dari realitas

Dalam pandangan positivis, berita adalah refleksi dan pencerminan dari realitas, berita adalah *mirror of reality*, karena itu berita haruslah sama dan sebangun dengan fakta yang hendak diliput (mencerminkan realitas yang hendak diteliti). Pandangan ditolak oleh kaum konstruksionis. Menurut kaum konstruksionis, berita adalah hasil dari konstruksi sosial dimana selalu melibatkan pandangan, ideologi, dan nilai-nilai dari wartawan atau media.

Bagaimana realitas itu dijadikan berita sangat tergantung pada bagaimana fakta ini di dipahami dan dimaknai. Proses pemaknaan selalu melibatkan nilai-nilai tertentu sehingga mustahil berita merupakan pencerminan dari realitas. Realitas yang sama bisa menghasilkan berita yang berbeda, karena ada cara melihat yang berbeda.

d. Wartawan bukan pelapor, ia adalah agen konstruksi realitas

Wartawan sebagai partisipan yang menjembatani keragaman subjektif pelaku sosial. Dalam pandangan paradigma konstruksionis dalam memindahkan realitas ke dalam sebuah berita, wartawan tidak bisa menyembunyikan pilihan moral dan keberpihakan, karena wartawan merupakan bagian yang instrinsik dalam pembentukan berita. Berita juga bukan hanya produk individual, melainkan juga bagian dari proses organisasi dan interaksi antara wartawannya. Dalam menuliskan berita, wartawan sebetulnya membuat dan membentuk dunia, membentuk realitas.

e. Berita bersifat subjektif atau konstruksi atas realitas

Hasil kerja Jurnalistik tidak dapat dinilai dengan menggunakan standart nilai yang rigid, hal ini karena berita adalah produk dari konstruksi dan pemaknaan atas

realitas. Pemaknaan seseorang atas suatu realitas bisa jadi berbeda dengan orang lain yang tentunya menghasilkan realitas yang berbeda pula. Karenanya, ukuran baku dan standar untuk bisa dipakai. Berita bersifat subjektif, artinya opini tidak dapat dihilangkan karena ketika meliput, wartawan melihat dengan perspektif dan pertimbangan subjektif.

3. Teori Konstruksi Realitas

Istilah konstruksi realitas menjadi terkenal sejak diperkenalkan oleh Peter L. Berger dan Thomas Luckmann melalui bukunya *The Social Construction of Reality: A Treatise in The Sociological of Knowledge*, yang kemudian diterbitkan dalam edisi bahasa Indonesia dengan judul *Tafsir Sosial atas Kenyataan: Risalah tentang Sosiologi Pengetahuan* (1990). Dalam buku tersebut digambarkan proses sosial melalui tindakan dan interaksinya, di mana individu secara intens menciptakan suatu realitas yang dimiliki dan dialami bersama secara subyektif.¹⁰

Menurut Berger dan Luckmann (1990) realitas sosial dikonstruksi melalui proses eksternalisasi, obyektivasi dan internalisasi: (1) Eksternalisasi, yaitu usaha pencurahan atau ekspresi diri manusia ke dalam dunia, baik dalam kegiatan

¹⁰ Alex Sobur, *Analisis Teks Media, Suatu Pengantar untuk Analisis Wacana, Analisis Semiotik dan Analisis Framing*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2002), hlm. 91.

mental maupun fisik. Proses ini merupakan bentuk ekspresi diri untuk menguatkan eksistensi individu dalam masyarakat. Pada tahap ini, masyarakat dilihat sebagai produk buatan manusia. (2) Obyektivitas, yaitu hasil yang dicapai dari poses internalisasi. Hasil itu menghasilkan realitas obyektif yang bisa jadi akan menghadapi si penghasil sendiri sebagai suatu obyektifitas yang berada di luar dan berlainan dari manusia yang menghasilkannya. Lewat proses obyektivitas tersebut, masyarakat menjadi realitas *sui generis*. Setelah dihasilkan menjadi realitas obyektif, realitas obyektif itu berbeda dengan kenyataan subyektif perorangan. Ia menjadi kenyataan empiris yang bisa dialami oleh setiap orang. (3) Internalisasi. Proses internalisasi lebih merupakan penyerapan kembali dunia obyektif ke dalam kesadaran sedemikian rupa sehingga subyektif individu dipengaruhi oleh struktur dunia sosial. Melalui internalisasi, manusia menjadi hasil dari masyarakat.

Realitas sosial merupakan pengetahuan yang bersifat keseharian yang hidup seperti konsep, kesadaran umum dan wacana publik sebagai hasil dari konstruksi sosial. Realitas sosial tidak berdiri sendiri tanpa kehadiran individu, baik di dalam maupun di luar realita tersebut. Realitas sosial itu memiliki makna ketika realitas sosial dikonstruksi dan dimaknakan secara subyektif oleh individu lain sehingga

memantapkan realitas itu secara obyektif. Individu mengkonstruksi realitas sosial dan merekonstruksikannya dalam dunia realitas, memantapkan realitas itu, berdasarkan subyektifitas individu lain dalam institusi sosialnya. Konstruksi sosial, tidak berlangsung dalam ruang hampa, namun sarat dengan kepentingan-kepentingan.¹¹

Realitas sosial yang dimaksud terdiri dari realitas obyektif, realitas simbolik dan realitas subyektif. Realitas obyektif adalah realitas yang terbentuk dari pengalaman di dunia obyektif yang berada di luar diri individu, dan realitas ini dianggap sebagai kenyataan. Realitas simbolik merupakan ekspresi simbolik dari realitas obyektif dalam berbagai bentuk. Sedangkan realitas subyektif adalah realitas yang terbentuk sebagai proses penyerapan kembali realitas obyektif dan simbolik ke dalam individu melalui proses internalisasi.¹²

Menurut McNair suatu peristiwa, termasuk peristiwa politik memiliki 3 kategori realitas, yakni: *Pertama*, realitas politik obyektif, yaitu realitas yang ditampilkan sesuai dengan apa yang sebenarnya terjadi. *Kedua*, realitas politik subyektif, yaitu realitas yang dipersepsikan oleh khalayak atau aktor politik itu sendiri. *Ketiga*, realitas politik yang dikonstruksi, yaitu realitas yang juga subyektif tapi di-*cover* melalui media.

¹¹ *Ibid.*, hlm. 91.

¹² Burhan Bungin, *Imaji Media Massa: Konstruksi dan Makna Realitas Sosial Iklan Televisi dalam Masyarakat Kapitalis*, (Yogyakarta: Jendela, 2001), hlm. 13.

Media pada hakekatnya adalah mengkonstruksi realitas. Isi media adalah hasil para pekerja media mengkonstruksikan berbagai realitas yang dipilihnya, di antaranya realitas politik.

Dengan demikian, isi media pada hakekatnya adalah hasil konstruksi realitas dengan bahasa sebagai perangkat dasarnya. Bahasa bukan saja sebagai alat merepresentasikan realitas, namun juga bisa menentukan relief seperti apa yang akan diciptakan oleh bahasa tentang realitas tersebut. Akibatnya, media massa mempunyai peluang yang sangat besar untuk mempengaruhi makna dan gambaran yang dihasilkan dari realitas yang dikonstruksikannya. Bagi media bahasa bukan sekedar alat komunikasi untuk menyampaikan fakta, informasi atau opini. Bahasa juga bukan sekedar alat komunikasi untuk menggambarkan realitas, namun juga menentukan gambaran atau citra tertentu yang hendak ditanamkan kepada publik.

4. Ekonomi Politik Media

Perkembangan teknologi dan ekonomi telah membawa manusia yang semula berperan sebagai *political citizen* menjadi unit konsumsi pada perusahaan di dunia. Dengan demikian, ranah *public sphere* menurut Philip Elliot lambat laun telah mengalami erosi secara serius. Menjadi pertanyaan penting bagi kajian ekonomi politik adalah melakukan kajian bagaimana kekuasaan yang ada melakukan kendali atas produksi budaya

(teks) dan distribusinya baik membatasi atau menyebar luaskan pada ranah *public sphere*. Dalam prakteknya, muncul dua isu kunci. Pertama, pola kepemilikan dari beberapa institusi dan konsekuensi dari pola tersebut untuk mengendalikan aktivitas mereka. Kedua, hubungan alamiah antara regulasi negara dengan institusi komunikasi.¹³

Produksi teks juga dipengaruhi oleh strategi komersial yang dibangun atas dasar sinergitas antar perusahaan media yang mempunyai kepentingan yang berbeda. Misalnya, perusahaan surat kabar akan memberikan publikasi yang gratis stasiun TV mereka, studio rekaman dan divisi buku melakukan *launching* produk mereka yang berhubungan dengan film terbaru yang dirilis oleh bagian film. Dengan demikian, dampak yang dimunculkan adalah tidak adanya keragaman produk budaya.

Beberapa dekade terakhir menunjukkan bahwa sistem kepemilikan media publik telah berubah dengan adanya kebijakan privatisasi. Beberapa media yang seharusnya menjadi milik publik, telah dijual pada investor swasta. Resiko yang dimunculkan dengan kebijakan yang demikian adalah kebudayaan (teks) yang dihasilkan hanya akan mengikuti kepentingan dari para pemilik modal tersebut. Sehingga tugas

¹³ Agus Triyono, *Produksi Teks Dalam Perspektif Ekonomi Politik Media, KomuniTi*, Vol.IV No.1 Fakultas Komunikasi dan Informatika Universitas Muhammadiyah Surakarta (Januari 2012), hlm. 22.

dari ekonomi politik kritis adalah mencari dampak terhadap keragaman budaya (teks) atas kebijakan privatisasi tersebut.

Menurut Mc Manus (1994, 114-115), terdapat tiga tahapan penting dalam proses produksi berita.¹⁴ *Pertama, news discovery* yakni upaya pencarian berita. *Kedua, news selection*, proses memilih berita yang akan diproduksi. Dalam tahap pemilihan berita ini ada tiga pertimbangan yang lazim digunakan, yakni: pertimbangan jurnalistik, pertimbangan pasar dan kompromi antara jurnalisme dan pasar. Pada pertimbangan jurnalistik yang digunakan adalah kode etik dasar dari jurnalisme yang disebut sebagai tanggung jawab sosial, bahwa informasi harus dapat memberdayakan publik melalui proses-proses demokratik, tidak untuk kepentingan perusahaan media. Berita seharusnya mengorientasikan orang pada lingkungannya dan membantu mereka membuat keputusan. Pertimbangan pasar biasanya mengarahkan pemilihan berita pada isu atau kejadian yang menarik dengan rasio yang paling besar pada khalayak yang diinginkan dan lebih jauh lagi mendahulukan kepentingan pengiklan dan investor atau paling tidak meminimalisasi hal-hal yang justru dapat merugikan mereka. Jalan tengah atau kompromi dilakukan dengan membuat dua jenis berita yang bisa

¹⁴ *Ibid.*, hlm. 23.

mengikuti dua cara di atas atau dengan hanya meliput kejadian atau isu yang memenuhi kedua persyaratan di atas.

Ketiga, news reporting yang memerlukan keputusan jurnalis untuk hal-hal sebagai berikut: pemilihan nara sumber dan data-data atau dokumen yang diperlukan. Ketika seorang jurnalis sudah memperoleh berbagai informasi yang dikehendaki timbul pertanyaan berikut: kutipan mana yang hendak dimasukkan? Fakta apa dari sejumlah fakta yang akan digunakan? Bagaimana menyusun berita sehingga menghasilkan narasi yang koheren?

Shoemaker dan Reese (1996), menyatakan bahwa dalam proses produksi berita setidaknya dipengaruhi oleh sejumlah faktor.¹⁵ Secara garis besar, faktor-faktor tersebut antara lain (1) ideologi, (2) ekstra media, (3) organisasional, (4) rutinitas media, dan (5) faktor individual yaitu pekerja media. Masing-masing faktor ini juga dipengaruhi oleh faktor-faktor lainnya. *Pertama*, faktor individual. Dalam melakukan konstruksi realitas, faktor individual pekerja media sangat berpengaruh sebagaimana dia akan mengkonstruksi sebuah realitas yang dilihatnya di lapangan. Faktor-faktor tersebut adalah karakteristik komunikator dan latar belakang kepribadian dan profesionalismenya. Pengaruh sikap pribadi, nilai-nilai dan

¹⁵ *Ibid.*, hlm. 23-25.

keyakinan dari seorang komunikator, sikap yang dianggap sebagai latar belakang pengalaman pribadi. Orientasi profesionalisme dan konsepsi peran yang dipegang seorang komunikator, sehingga fungsi untuk mensosialisasikannya terhadap pekerjaannya.

Kedua adalah faktor rutinitas media (*media routine*). Faktor ini berkaitan dengan keseharian dari mekanisme pembentukan berita. Pada setiap media massa memiliki kebijakan pemberitaan dan pengolahan berita tersendiri yang sudah menjadi ciri khas media tersebut. Kebijakan redaksional tersebut dioperasionalkan dalam mekanisme kerja redaksi yang dimulai dari proses perencanaan berita. Kenyataan juga menunjukkan mekanisme kerja redaksional. Individual level dibatasi oleh hambatan waktu dan halaman, kedua batasan ini dianggap juga sebagai faktor yang mempengaruhi rutinitas. Di samping kedua hambatan tersebut, mekanisme kerja redaksional tersebut dipengaruhi dengan alur produksi berita, dimana sebuah berita yang terbentuk harus melalui suatu proses *gatekeeping*, yaitu rangkaian penjaga gerbang yang muncul mulai dari jajaran reporter, redaktur hingga pemimpin redaksi.

Ketiga, faktor organisasi media. Karakter organisasi terdiri dari komponen kelembagaan organisasi itu sendiri, struktur organisasi, hingga sistem keorganisasian yang diterapkan.

Mengenai kelembagaan organisasi misalnya, aspek redaksional pemberitaan adalah bukan satu-satunya faktor yang mempengaruhi proses produksi berita. Unit-unit lainnya, seperti sirkulasi iklan, merupakan aspek lain yang turut berperan dalam proses pengambilan keputusan redaksional. *Keempat*, faktor ekstra media, yaitu faktor yang berasal dari luar lingkungan media yang turut mempengaruhi proses produksi berita. Berkaitan dengan faktor ini, Shoemaker dan Reese (1996) mengidentifikasi tiga aspek yang dipengaruhi, yaitu: sumber berita media massa, sumber penghasilan media massa, dan institusi lain di luar media massa seperti pemerintah, kalangan bisnis maupun keberadaan teknologi.

Kelima, faktor ideologi, yang seringkali diartikan dengan kerangka referensi yang ada di dalam masing-masing individu tersebut dalam melihat suatu realitas dan bagaimana individu-individu tersebut menyikapi realitas tersebut. Melalui faktor ini, dapat dilihat kekuatan yang dominan di masyarakat dan sekaligus di media massa, sehingga kekuatan tersebut mampu berperan dalam penentuan agenda media tersebut.

Pemilik media dan investor sebagai agen ekonomi secara alamiah akan berupaya untuk mendukung kebijakan berita dan prosedur yang menjamin keuntungan baik jangka panjang maupun jangka pendek. Untuk ini, mereka berupaya merespon

kepentingan baik khalayak maupun pengiklan. Pada waktu yang bersamaan, setiap organisasi berita harus mengorientasikan dirinya juga pada kompetitor yang berada pada arena yang sama.

Agen politik seperti pembuat kebijakan adalah mereka yang membuat kerangka kerja secara umum mengenai bagaimana sebuah media berita harus beroperasi dengan berbagai kepentingan. Agen narasumber merepresentasikan pemberi informasi bagi berita dan karenanya hubungan dengan narasumber ini dipelihara untuk memastikan peliputan yang berkelanjutan dari sector-sektor sosial utama.

Pemerintah mempengaruhi media bukan hanya melalui tekanan ekonomi, melainkan juga monopoli terhadap informasi yang resmi, narasumber pemerintah adalah contoh yang paling nyata. Jenis monopoli ini memberikan pada pemerintah yang memiliki otoritas kekuasaan untuk memanipulasi berita atau memilih sumber-sumber berita tertentu untuk mendapatkan berita yang eksklusif. Khalayak juga dilihat sebagai pasar atau konsumen yang juga harus dipahami dan dalam kerangka yang luas, khalayak dari sebuah organisasi berita terdiri dari konstitusi yang heterogen, mulai dari jurnalis lain sampai pada publik umum yang akan memberikan label dan memuat peringkat media berita dalam hubungannya dengan yang lain.

Dalam sektor ekonomi dan politik, media massa mampu menyebarkan dan memperkuat sistem ekonomi dan politik tertentu dan tidak jarang melakukan negasi atas sistem ekonomi dan politik yang lain. Meskipun demikian, satu hal yang tidak bisa kita abaikan adalah bahwa media massa secara tidak langsung menjalankan fungsi ideologis tertentu seperti yang dianut oleh pemilik media. Berdasarkan hal tersebut, upaya melihat media secara integratif tidak bisa hanya dilakukan dengan pendekatan ekonomi semata, akan tetapi juga melibatkan pendekatan politik. Untuk itulah, kemudian, kajian ekonomi politik tentang produksi budaya (teks) menjadi suatu kajian yang penting.

5. Analisis Framing

Gagasan mengenai *framing*, pertama kali dilontarkan oleh Beterson tahun 1955.¹⁶ Awal mulanya *frame* dimaknai sebagai struktur konseptual atau perangkat kepercayaan yang mengorganisir pandangan politik, kebijakan dan wacana serta yang menyediakan kategori-kategori standar untuk mengapresiasi realitas. Tetapi akhir-akhir ini, konsep *framing* telah digunakan secara luas dalam literatur ilmu komunikasi untuk menggambarkan proses penyeleksian dan penyorotan aspek-aspek khusus sebuah realita oleh media.

¹⁶ Alex Sobur, *Analisis Teks Media*, hlm. 161.

Framing secara sederhana adalah membingkai sebuah peristiwa. *Framing* adalah pendekatan untuk mengetahui bagaimana perspektif atau cara pandang yang digunakan oleh wartawan ketika menyeleksi isu dan menulis berita. Cara pandang tersebut yang pada akhirnya menentukan fakta apa yang diambil, bagian mana yang ditonjolkan dan bagian mana yang dihilangkan, serta hendak dibawa ke mana berita tersebut.

Menurut Imawan pada dasarnya *framing* adalah pendekatan yang digunakan untuk melihat bagaimana media mengkonstruksi realitas. Untuk melihat bagaimana cara media memaknai, memahami dan membingkai kasus atau peristiwa yang diberitakan. Sebab media bukanlah cerminan realitas yang memberitakan apa adanya. Namun, media mengkonstruksi realitas sedemikian rupa, ada fakta-fakta yang diangkat ke permukaan, ada kelompok-kelompok yang diangkat dan dijatuhkan, ada berita yang dianggap penting dan tidak penting. Karenanya, berita menjadi manipulatif dan bertujuan untuk mendominasi keberadaan subjek sebagai sesuatu yang *legitimate*, objektif, alamiah, wajar atau tak terelakkan.¹⁷

Membuat *frame* adalah menyeleksi beberapa aspek dari suatu pemahaman atas realitas dan membuatnya lebih menonjol dalam suatu teks yang dikomunikasikan sedemikian rupa hingga

¹⁷ *Ibid.*, hlm, 162.

mempromosikan sebuah definisi permasalahan yang khusus, interpretasi kausal, evaluasi moral dan merekomendasi penanganannya.

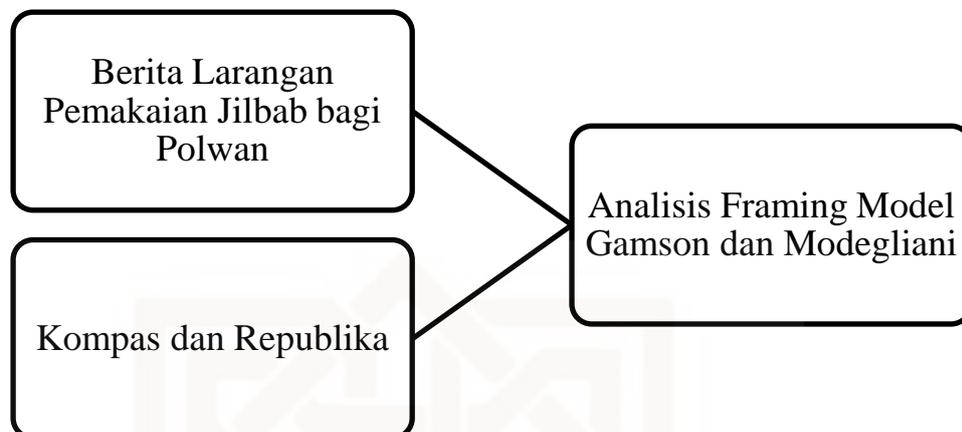
Framing secara esensial, menurut Robert M. Entman meliputi penyeleksian dan penonjolan. Dari definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa fungsi framing adalah mendefinisikan masalah, mendiagnosis penyebab, memberikan penilaian moral dan menawarkan penyelesaian masalah dengan tujuan memberi penekanan tertentu terhadap apa yang diwacanakan.

Definisi lain tentang *framing* dikemukakan oleh Gamson dan Modigliani. Mereka berpendapat bahwa *frame* adalah cara bercerita yang menghadirkan konstruksi makna atas peristiwa-peristiwa yang berkaitan dengan objek suatu wacana.

F. Kerangka Pikir

Menurut Uma Sekaran, dalam sugiyono (1997), mengemukakan bahwa kerangka pemikiran merupakan model konseptual tentang bagaimana teori berhubungan dengan berbagai faktor yang telah diidentifikasi sebagai masalah yang penting. Kerangka pemikiran yang baik akan menjelaskan secara teoritis hubungan antara variabel yang akan diteliti.

Tabel 1 Kerangka Pikir Penelitian



Salah satu tugas media adalah mem-*back up* berbagai aspirasi golongan yang cenderung terabaikan hak-haknya. Dengan mengekspos suatu persoalan tertentu kepada khalayak maka secara otomatis akan mendapat perhatian dari banyak orang. Dengan demikian persoalan yang awalnya hanya menjadi perbincangan segelintir orang, pada gilirannya tidak bisa dielekkkan bermetamorfosis menjadi opini publik.

Munculnya wacana terkait kegelisahan dari polwan muslim untuk memakai jilbab saat bertugas pada dasarnya bukanlah persoalan yang harus diekspos ke publik. Namun begitu, mengingat keinginan tersebut tidak mendapat legitimasi dalam UU Kepolisian maka mungkin dipandang perlu oleh media massa untuk didukung oleh kalangan yang lebih luas. Ketika sesuatu dianggap bernilai positif dan tidak mengganggu profesionalisme maka selayaknya pemikiran tersebut bisa merata. Dalam konteks inilah peran media massa sangat diperlukan.

Dengan berlandaskan pada formula Lasswell yakni: *who, says whats, in which channel, to whom and with what effect* diharapkan nantinya penelitian ini akan memenuhi target penelitian. Ditambah lagi, framing yang dilakukan oleh Koran Harian Republika dan Kompas nantinya akan memperjelas bagaimana seharusnya persoalan di atas disikapi.

G. Hasil Penelitian Terdahulu yang Relevan

Tujuan dari poin ini adalah untuk mengetahui hasil dari penelitian yang pernah dilakukan sebelumnya serta memastikan bahwa masalah yang akan diteliti belum pernah diteliti oleh pihak manapun. Beberapa penelitian yang dilakukan oleh banyak pihak antara lain:

Pertama, skripsi berjudul Analisis Framing Kasus Poligami K.H Abdullah Gymnastiar di Media Kompas dan Republika yang disusun oleh Marlina Ngatmin. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode Analisis Framing model Robert M. Entman. Salah satu kesimpulan yang dihasilkan dalam penelitian ini bahwa Surat Kabar Harian Republika membingkai berita poligami yang dilakukan oleh Aa Gym sebagai masalah hukum Islam. Dalam kasus ini Republika lebih memandang permasalahan poligami dari sisi hukum Islam. Di mana poligami dalam islam tidak dilarang, bahkan rasulullah juga menjalankannya, asalah saja melalui proses dan ketentuan ketat yang berlaku dalam hukum islam. Tidak ada yang salah dengan poligami yang

dilakukan oleh Aa Gym, sebab dia telah melalui ketentuan ketat yang berlaku dalam islam.¹⁸

Kedua, skripsi berjudul Konstruksi Berita 100 Hari SBY-Boediono (Studi Analisis Framing tentang Berita 100 Hari SBY-Boediono Pada Harian Kompas) yang disusun oleh Andi Sunarjo Simatupang. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui konstruksi berita tentang pemberitaan 100 hari SBY-Boediono dalam harian *Kompas*. Isu 100 hari SBY-Boediono menjadi penting karena momen yang sama baru terjadi setelah pemerintahan yang baru terbentuk. Keberhasilan pemerintah selama 100 hari pertama menjadi tolak ukur masyarakat selama lima tahun kedepan. Oleh karena itu, berbagai kepentingan mulai mewarnai berbagai berita tentang seratus hari ini. Dalam penelitian ini, metode yang dipakai adalah analisis *framing* versi Robert Entman. Melalui metode ini akan terlihat selektivitas isu, serta penonjolan aspek-aspek tertentu terkait isu yang diangkat. Selain itu, akan tampak jelas *define problem, diagnose causes, make moral judgement, serta treatment recommendation*. Melalui penelitian ini diketahui posisi harian *Kompas* dalam memandang isu 100 hari pemerintahan SBY-Boediono. *Kompas* memandang adanya ketidakpuasan masyarakat terhadap kinerja pemerintah. Berbagai kelemahan pemerintah dalam berbagai kasus yang berkembang menjadi

¹⁸ Marlina Ngatmin, *Analisis Framing Kasus Poligami K.H Abdullah Gymnastian di Media Kompas dan Republika*, Skripsi (Yogyakarta: Universita Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2007), hlm. 31-71.

pemicunya. Kritik yang diberikan terhadap pemerintah diharapkan menjadi masukan agar pemerintah berkerja lebih serius kedepannya.¹⁹

Ketiga, skripsi berjudul Pembingkai Berita Kasus Anggodo pada Media Jawapos dan Republika (Studi Analisis Framing Kasus Anggodo pada Media Cetak Jawa Pos dan Republika) yang disusun oleh Mashudi. Penelitian ini diteliti menggunakan teknik analisis framing dengan metode penelitian kualitatif. Analisis framing yang digunakan adalah model yang dikembangkan oleh Zhongdang Pan dan Gerald M. Kosicki, dimana dalam analisis ini terdiri dari beberapa unsur yaitu struktur sintaksis, struktur skrip, struktur tematik, dan struktur retorik. Unit analisis dalam penelitian ini kalimat dan kata yang dimuat dalam teks berita kasus Anggodo pada media Jawa Pos dan Republika.

Hasil dan analisis data menunjukkan bahwa dalam berita tentang kasus Anggodo menggunakan berbagai struktur analisis framing yakni struktur sintaksis, struktur skrip, struktur tematik, dan struktur retorik. Surat kabar Republika memberitakan bahwa dalam proses pemeriksaan Anggodo oleh polri, Anggodo dibebaskan karena tidak ada cukup bukti untuk menjadikan Anggodo sebagai tersangka. Sedangkan surat kabar Jawa Pos memberitakan dari desakan TPF untuk tetap menahan Anggodo, karena ada bukti untuk menjadikan Anggodo sebagai tersangka. Kesimpulan dari penelitian ini menunjukkan bahwa dalam berita tentang kasus Anggodo pada media Jawa Pos dan Republika memiliki perspektif

¹⁹ Andi Sunarjo Simatupang, *Konstruksi Berita 100 Hari SBY-Boediono (Studi Analisis Framing tentang Berita 100 Hari SBY-Boediono pada Harian Kompas)*, skripsi (Medan: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sumatera Utara, 2010), hlm. i.

yang berbeda. Media Jawa Pos membingkai berita dari desakan TPF untuk tetap menahan Anggodo, karena ada bukti untuk menjadikan Anggodo sebagai tersangka, sedangkan media Republika membingkai berita bahwa dalam proses pemeriksaan Anggodo oleh polri, Anggodo dibebaskan karena tidak ada cukup bukti untuk menjadikan Anggodo sebagai tersangka.²⁰

Untuk menegaskan keaslian penelitian yang sedang penulis susun, maka dipandang perlu mengetahui perbedaan dan persamaan dengan ketiga penelitian di atas. Yang menjadi kesamaan dengan ketiga penelitian di atas adalah sama-sama menggunakan analisis framing dalam menganalisis permasalahan. Sedangkan perbedaannya adalah model analisis framing yang digunakan penulis berbeda dengan ketiga penelitian tersebut, yaitu model Gamson dan Modigliani.

H. Metodologi Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan kritis dengan melihat adanya kekuatan-kekuatan yang berbeda dalam media yang mengontrol pemberitaan. Sedangkan dalam menganalisis teks berita menggunakan adalah Framing. Framing digunakan untuk mengetahui bagaimana

²⁰ Mashudi, *Pembingkaihan Berita Kasus Anggodo pada Media Jawapos dan Republika (Studi Analisis Framing Kasus Anggodo pada Media Cetak Jawa Pos dan Republika)*, skripsi (Surabaya: Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, 2010), hlm. 10.

perspektif atau cara pandang yang digunakan oleh wartawan ketika menyeleksi dan menulis berita. Pembingkaiannya itu tentu saja melalui proses konstruksi. Di sini realitas dimaknai dan dikonstruksi dengan makna tertentu. Peristiwa dimaknai dengan bentuk tertentu.

2. Subyek dan Obyek Penelitian

Obyek penelitian adalah istilah-istilah untuk menjawab apa yang sebenarnya akan diteliti dalam sebuah penelitian atau data yang akan dicari dalam penelitian. Subyek penelitian dalam penelitian ini adalah Koran Harian Republika dan Kompas. Adapun yang menjadi obyek penelitian dalam penelitian ini adalah pemberitaan terkait larangan penggunaan jilbab bagi polwan dalam surat kabar harian Republika dan Kompas. Penulis melihat bentuk penyajian berita oleh kedua media tersebut berdasarkan konsep framing dari Gamson dan Modigliani.

3. Sumber Data

Sumber data primer dalam penelitian ini adalah beberapa berita pada Koran Harian Republika Edisi 6-12 Juni 2013 dan Kompas Edisi 14 Juni-9 Juli 2013 yang berjumlah delapan berita. Pembatasan dengan delapan berita tersebut dikarenakan dalam satu edisi banyak terdapat beberapa berita dengan tema yang sama.

Adapun beberapa berita Koran Republika tersebut yaitu:

1. DPR Minta Kapolri Segera Respos Permintaan Berjilbab Polwan (6 Juni 2013)

2. Jilbab Bagi Polwan Harus Dikaji (9 Juni 2013)
3. HTI Minta Polri Ubah Aturan Seragam Polwan Tak Boleh Berjilbab (10 Juni 2013)
4. Melarang Polwan Berjilbab Sama Saja Melanggar HAM (12 Juni 2013)

Sedangkan berita Kompas yang dimaksud adalah:

1. PPP Izinkan Polwan Berjilbab (14 Juni 2013)
2. Sesuai Aturan, Polwan tidak Bisa Pakai Jilbab (14 Juni 2013)
3. Polri Evaluasi Penggunaan Jilbab Untuk Polwan (19 Juni 2013)
4. Polri Kaji Penggunaan Jilbab bagi Polwan (9 Juli 2013)

Sedangkan sumber data sekunder, penulis menggunakan segala data tertulis yang berhubungan dengan tema yang bersangkutan baik dari buku, jurnal, skripsi, tesis, majalah dan penelitian-penelitian lain.

4. Tehnik Sampling

Adapun metode yang digunakan dalam pengambilan sampel adalah *Nonprobability Sampling*. Yaitu metode pengambilan sampel yang tidak memberi peluang atau kesempatan sama bagi setiap unsur atau anggota populasi untuk dipilih menjadi sampel karena pertimbangan tertentu. Yang menjadi syarat pertimbangan dalam *non probability sampling* pada penelitian ini adalah berita terkait larangan penggunaan jilbab bagi Polwan dalam Surat Kabar Harian Republika dan Kompas.

5. Teknik Pengumpulan Data

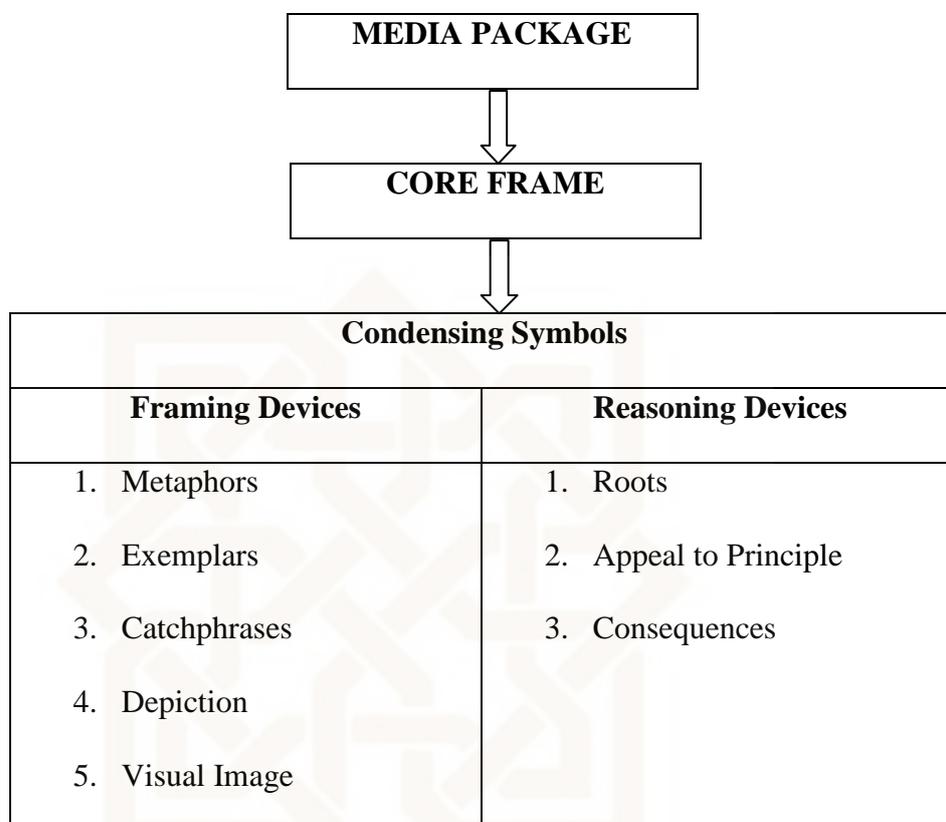
Dalam penelitian ini digunakan metode dokumentasi, yaitu mencari data mengenai hal-hal atau variable yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen, rapat agenda dan sebagainya. Dengan demikian, penelitian ini termasuk studi pustaka di mana teknik pengumpulan datanya melalui sumber-sumber dokumen, catatan yang mengandung petunjuk tertentu. Dalam hal ini penulis mengolah data dari berbagai literatur, buku, majalah, jurnal, surat kabar, dan tulisan-tulisan yang berhubungan dengan topik penelitian.²¹

6. Teknik Analisis Data

Penelitian ini menggunakan analisis *framing* dengan model analisis milik Gamson dan Modigliani. Analisis *framing* yang dikembangkan Gamson dan Modigliani memahami media sebagai satu gagasan interpretasi (*interpretative package*) saat mengkonstruksi dan memberi makna pada suatu isu. Model ini didasarkan pada pendekatan konstruksionis yang melihat representasi media seperti berita dan artikel terdiri atas *interpretative package* yang mengandung konstruksi makna tertentu. Di dalam *package* ini terdapat dua struktur yaitu *Core Frame* dan *Condensing Symbols*. Berikut adalah model analisis *framing* Gamson dan Modigliani:

²¹ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1996), hlm. 234.

Tabel 2 Kerangka Framing Gamson dan Modegliani



Sumber: Alex M. Sobur, *Analisis Teks Media: Suatu Pengantar Untuk Analisis Wacana, Analisis Semiotik, dan Analisis Framing*

Core frame (gagasan sentral) pada dasarnya berisi elemen-elemen inti untuk memberikan pengertian yang relevan terhadap peristiwa dan mengarahkan makna isu yang dibangun *condensing symbol*. *Condensing symbol* (simbol yang dimanfaatkan) adalah hasil pencermatan terhadap interaksi perangkat simbolik (*framing device* dan *reasoning devices*) sebagai dasar digunakannya perspektif simbol dalam wacana terlihat transparan apabila dalam dirinya terdapat perangkat bermakna yang mampu berperan sebagai panduan untuk menggantikannya sesuatu yang lain.

Struktur *framing devices* mencakup *metaphors*, *exemplars*, *catchphrases*, *depiction* dan *visual images*. Struktur ini menekankan aspek bagaimana melihat suatu isu. *Metaphors* diartikan sebagai cara memindahkan makna dengan menghubungkan dua fakta melalui analog atau memakai kiasan dengan menggunakan kata-kata seperti ibarat, bak, sebagai, umpama, laksana. *Exemplars* mengemas fakta tertentu secara mendalam agar satu sisi memiliki bobot makna lebih untuk dijadikan acuan. Posisinya menjadi pelengkap bingkai inti dalam kesatuan berita untuk membenarkan perspektif. *Catchphrases* adalah istilah, bentukan kata atau frase khas cerminan fakta yang merujuk atau semangat tertentu. *Depiction* adalah penggambaran fakta dengan memakai kata, istilah dan kalimat konotatif agar khalayak terarah ke citra tertentu. *Visual Images* seperti pemakaian foto, diagram, grafis, tabel, kartun dan lainnya digunakan untuk mengekspresikan kesan.

Struktur *reasoning devices* menekankan aspek pembenaran terhadap cara melihat isu yakni dengan *roots* (analisis kausal) dan *appeal to principle* (klaim moral). *Roots* adalah pembenaran isu dengan menghubungkan suatu objek atau lebih yang dianggap menjadi sebab timbulnya atau terjadinya hal yang lain. Tujuannya adalah membenarkan penyimpulan fakta berdasarkan hubungan sebab-akibat yang digambarkan. *Appeal to principle* adalah pemikiran prinsip yang digunakan sebagai argumentasi pembenaran membangun berita berupa

pepatah, cerita rakyat atau mitos. Tujuannya adalah membuat khalayak tak berdaya menyanggah argumentasi.



BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Penelitian ini bermaksud menjawab satu pertanyaan besar, yaitu Bagaimana framing pemberitaan Surat Kabar Harian Republika Edisi 4-15 Juni dan Koran Kompas Edisi 14 Juni-9 Juli 2013? Jika diuraikan lebih lanjut pertanyaan ini sebenarnya mengandung tiga poin inti, yakni: bagaimana cara pemberitaan yang dilakukan Republika dan Kompas; bagaimana penulisan berita yang digunakan Republika dan Kompas, dan; pemingkakan Republika dan Kompas terkait larangan pemakaian jilbab bagi Polwan.

Dari hasil analisis *framing* berita-berita mengenai larangan penggunaan jilbab bagi polwan seperti yang telah diuraikan pada bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Republika cenderung menunjukkan sikap pro terhadap keinginan polwan menggunakan jilbab, sedangkan Kompas melihat persoalan ini sebagai masalah kebijakan semata.
2. Dari segi penulisan berita kedua media tersebut dapat dibilang tidak ada perbedaan yang mencolok. Baik Republika ataupun Kompas sama-sama menggunakan bahasa yang standart.
3. Republika menganggap persoalan ini sebagai bagian dari Hak Asasi Manusia, sehingga harus segera disikapi oleh petinggi polri. Sedangkan Kompas hanya menyarankan agar petinggi polri mengavaluasi kembali

peraturan terkait seragam kepolisian selama hal tersebut masih bernilai positif.

B. Saran

Media massa mempunyai peran penting dalam pencitraan. Media massa dapat membentuk pencitraan tertentu dari suatu peristiwa atau suatu kelompok dan dipahami sebagai kebenaran umum dalam masyarakat. Simbol-simbol atau istilah yang terus menerus diulang menciptakan citra tersendiri tentang sesuatu di mata masyarakat.

Berita yang ditampilkan oleh media massa adalah produk simbolik yang diproduksi berdasarkan subjektivitas wartawan dan pengelola media. Terkait pemberitaan mengenai larangan pemakaian jilbab bagi Polwan, media massa harusnya lebih bersikap proaktif dalam membingkai pemberitaan. Larangan pemakaian jilbab bagi Polwan adalah isu sensitif di mana seharusnya dilakukan advokasi secara terus menerus sampai tidak ada satupun pihak merasa terdiskriminasi. Sebab (dalam konteks demokrasi) diskriminasi atas dasar apapun adalah sebuah kejahatan.

Pada sisi lain, kepada seluruh mahasiswa yang membaca skripsi ini, khususnya mahasiswa Fakultas Dakwah untuk melakukan pengkajian terhadap analisis isi dengan lebih serius. Analisis ini penting karena untuk melihat konstruksi penulisan berita, bagaimana berita itu dibingkai dan dituliskan. Dengan pengetahuan tersebut diharapkan mampu

memanfaatkannya dalam berdakwah di jalan-Nya sebagai implementasi dari keilmuan yang selama ini digeluti.



DAFTAR PUSTAKA

Buku-buku:

- Alex Sobur, *Analisis Teks Media: Suatu Pengantar Untuk Analisis Wacana, Analisis Semiotika dan Analisis Framing*, Bandung: Remadja Karya, 2004.
- Andi Sunarjo Simatupang, *Konstruksi Berita 100 Hari SBY-Boediono (Studi Analisis Framing tentang Berita 100 Hari SBY-Boediono Pada Harian Kompas)*, skripsi Medan: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sumatera Utara, 2010.
- Burhan Bungin, *Sosiologi Komunikasi: Teori, Paradigma, dan Diskursus Teknologi Komunikasi di Masyarakat*, Jakarta: Prenada Media Group, 2008.
- C.S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Jakarta: PN Balai Pustaka, 1982.
- Djafar Assegaf, *Jurnalistik Masa Kini*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1985.
- Eriyanto, *Analisis Framing: Konstruksi, Ideologi dan Politik Media*, Yogyakarta: LKis, 2001.
- H. Djaffar Assegaf, *Jurnalistik Masa Kini: Pengantar ke Praktek Kewartawanan*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1982.
- H. Hadari Nawawi, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1995.
- Helena Magdalena, *Hubungan Antara Stres dan Kepuasan Kerja Pada Polisi Wanita*, skripsi, Depok: Fakultas Psikologi Universitas Indonesia, 2008.
- Ibnu Hamad, *Konstruksi Realitas Politik Dalam Media Massa : Sebuah Studi Critical Discourse Analysis Terhadap Berita-berita Politik*, Jakarta: Granit, 2004.
- Jalaluddin Rakhmat, *Metode Penelitian Komunikasi*, Bandung PT. Remaja Rosdakarya, 2004.
- Marliana Ngatmin, *Analisis Framing Kasus Poligami K.H Abdullah Gymnastian di Media Kompas dan Republika*, Skripsi, Yogyakarta: Universita Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2007.

Mashudi, *Pembingkajian Berita Kasus Anggodo Pada Media Jawapos Dan Republika (Studi Analisis Framing Kasus Anggodo Pada Media Cetak Jawa Pos dan Republika)*, skripsi, Surabaya: Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, 2010.

Momo Kelana, *Hukum Kepolisian*, Jakarta: PT. Gramedia Widia Sarana Indonesia, 1994.

Onong Udjana Effendi, *Ilmu Komunikasi*, Bandung: Rosda karya, 1990.

Satjipto Raharjo, *Hukum Progresif, Sebuah Sintesa Hukum Indonesia*, Yogyakarta: Genta Publishing, 2009.

Satjipto Raharjo, *Membangun Polisi Sipil*, Jakarta: PT. Kompas Media Nusantara, 2009.

Sadjijono, *Prinsip Good Governance dalam Penyelenggaraan Kepolisian di Indonesia*, Yogyakarta: LaksBangPressindo, 2008.

Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: Rineka Cipta, 1996.

Syaikhuna Ahmad, *Analisis Framing Terhadap Pemberitaan Insiden Monas di Majalah Tempo Edisi 9-15 Juni 2008 dan Majalah Sabili Edisi No. 25 Th. XV 26 Juni 2008*, Skripsi, Fakultas Dakwah Institut Agama Islam Negeri Walisongo Semarang, 2010.

Undang-Undang No.2 Tahun 2002 Tentang *Kepolisian Negara Republik Indonesia*,

Wahyudi JB., *Komunikasi Jurnalistik*, Bandung: Alumni, 1991.

Internet:

“Jilbab” www.wikipedia.org, 26 Juni 2013.

“Profil Perusahaan”, www.library.upnvj.ac.id, 22 Januari 2013.